

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses Rekrutmen dan Kaderisasi dalam Partai politik menjadi bagian yang penting dalam menjalankan sebuah Partai juga sebagai perwujudan proses demokrasi di Indonesia dengan menempatkan kader dan representasi Partai Politik untuk mengisi posisi dalam pemerintahan. Partai Politik berperan penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap jalannya proses pemerintahan di Indonesia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan Konstitusi. Partai Politik di harapkan menjadi media penampung aspirasi dan sebagai komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah dan rakyat.

Proses Rekrutmen dan Kaderisasi menjadi hal yang penting dalam Partai Politik sebagai upaya terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menjalankan tugas di kursi pemerintahan. Rekrutmen dan kaderisasi lebih mengarah pada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpulan orang menuju suatu tujuan.

Rekrutmen sebagai kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan dipergunakan dalam membantu organisasi mencapai tujuannya (Ivancevich, 2007). Rekrutmen dalam Politik dengan adanya seleksi dan pengangkatan individu atau golongan untuk melaksanakan peran dalam sistem politik khususnya pemerintahan (Chalasin, 2007). Sehingga proses kaderisasi berpengaruh dalam mengajak orang yang tergabung dalam partai agar memiliki tujuan yang sama dan melanjutkan ideologi partai politik.

Rekrutmen politik dan kaderisasi menjadi penting bagi partai politik, proses rekrutmen partai politik menjadi fondasi bagi partai

politik untuk menempatkan kader-kadernya dalam jabatan politik. Tujuannya sederhana yaitu untuk mempersiapkan kader-kader rekrutan tersebut dengan kemampuan yang mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan kader-kader politik dari partai lain dan memiliki kemampuan dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban ketika terpilih dalam kompetisi politik tersebut.

Sementara kaderisasi sebagai bagian dari proses rekrutmen yang terdapat proses pelatihan, pembelajaran dan proses pembekalan bagi anggota agar nantinya menjadi kader yang mampu menjalankan peran dan fungsi partai politik yang lebih baik, proses kaderisasi dilakukan secara bertahap, sistematis dan nantinya kader akan memiliki jenjang kaderisasi yang bertahap.

Di dalam Partai Politik terdapat pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur dan mempengaruhi anggota atau kadernya untuk memiliki cita-cita dan tujuan yang sama dengan Partai Politiknya sehingga proses rekrutmen kaderisasi berperan penting sebagai proses untuk membentuk kepribadian dan gaya kepemimpinan bagi anggota partainya. Pola rekrutmen dan kaderisasi dimulai dari penerimaan anggota, peningkatan kualitas kader, hingga penempatan dan penugasan kader partai dalam suatu jabatan.

Dalam Politik terdapat kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan sesudah perubahan UUD 1945 diawali disahkannya UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu tingkat DPR, DPD dan DPRD “Usaha Peningkatan keterwakilan perempuan diwujudkan dengan memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD” sesuai dengan amanat pada Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.Seiring berjalannya waktu *Affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan seperti halnya ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu “UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu,UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

*Affirmatic action* juga terdapat pada tubuh Partai Politik yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% pada momen pendirian dan kepengurusan dalam Partai.Seperti pada UU No. 2 Tahun 2008 Partai Politik menyebutkan syarat pendirian Partai Politik, pasal 2 menyatakan:“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menyertakan 30% (tiga puluh perseratus)keterwakilan perempuan”. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa:“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”.

Gerakan politik perempuan harus dibangun berdasarkan tatanan nilai yang kokoh,gerakan politik perempuan harus didudukkan dalam kerangka gerakan reformatif.Gerakan Politik perempuan harus memiliki agenda yang jelas tentang cita-cita,perubahan dan tujuan perempuan dalam bernegara.Agenda yang harus diperhatikan dalam gerakan perempuan dirumuskan secara matang, kolektivitas yang akan lebih bagus kalau terlembaga,rasa solidaritas dan dilakukan secara terus menerus secara sistematis.

Fungsi rekrutmen berperan penting dalam proses menyediakan kader-kader yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga-lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas karena kader yang berkualitas akan mampu mengembangkan partai politiknya dan juga mampu membawa partai mewujudkan cita-cita dan tujuan partai.

Pada penelitian ini peneliti menjadikan Partai Gerindra sebagai objek penelitian, Partai Gerindra merupakan partai yang di bentuk pasca reformasi yang didirikan pada 6 Februari 2008 dan diketuai oleh Letnan Jenderal TNI(purna)H.Prabowo Subianto. Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang memiliki eksistensi dikalangan masyarakat, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya *Figure* H.Prabowo Subianto yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, memiliki watak yang tegas dan mampu mengayomi masyarakat. Agar Partai semakin berkembang dan tetap eksis partai Gerindra menjalankan fungsi rekrutmen politik sebagai salah satu elemen pendukung bagi partai. Rekrutmen ditujukan sebagai salah satu bentuk representasi partai politik dimana anggota sebagai sarana rekrutmen bagi partai untuk menjadi calon pemimpin skala internal maupun nasional.

Rekrutmen partai Gerindra sering dikatakan menggunakan rekrutmen terbuka dimana tidak adanya diskriminasi pada golongan, agama, suku atau ras tertentu sehingga bagi yang ingin bergabung dengan Partai Gerindra dapat memiliki kepercayaan diri dan tidak khawatir akan adanya diskriminasi.

Setelah mengikuti rekrutmen dan dinyatakan menjadi anggota partai maka selanjutnya harus mengikuti proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai Gerindra, tingkat pengkaderan dalam partai Gerindra berjenjang hal ini tentunya sangat memotivasi bagi para kader untuk mengikuti oengkaderan yang lebih tinggi tingkatnya. Presentase keterlibatan perempuan di Partai Gerindra sudah melebihi 30% namun hal ini harus dipertahankan. Dalam mempertahankan hal tersebut tentunya

harus ada rekrutmen dan kaderisasi lebih lanjut agar eksistensi Partai tetap berlanjut. Dalam mewujudkan keterlibatan perempuan dalam politik Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap Perempuan yang diberi nama Perempuan Indonesia Raya. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi rumah bagi perempuan Indonesia agar termotivasi dan mau terjun langsung dalam proses politik di Indonesia.

Pada periode 2014-2019 Gerindra menjadi salah satu diantara partai politik yang memperoleh suara paling banyak dari pada partai lainnya dengan jumlah 68.230 suara. Sementara jumlah perolehan kursi terbanyak dipegang oleh partai PKS dengan jumlah 8 kursi. Jumlah perolehan suara dari partai Gerindra adalah sebanyak 68.230. Jumlah ini diketahui lebih tinggi dari partai lainnya. Posisi perolehan suara tertinggi kedua setelah partai Gerindra yaitu partai PKS 66.443 suara. Sedangkan untuk posisi perolehan suara paling rendah yaitu partai PKPI sebanyak 960 suara.

Di Partai Gerindra struktur pengurus harian sudah memenuhi keterwakilan perempuan dari jumlah pengurus 292 orang terdapat 194 orang atau 66,44 % pengurus harian laki-laki sementara 98 orang atau 33,86 % pengurus perempuan. Jumlah tersebut telah memenuhi dan melampaui ketentuan dalam UU ParPol yang mengharuskan mengikutsertakan perwakilan perempuan minimal 30%.

Perempuan Indonesia Raya (PIRA) sebagai organisasi sayap perempuan Partai Gerindra yang didirikan dengan tujuan mengikutsertakan perempuan Indonesia untuk berperan dalam aspek kehidupan sebagai warga dari negara salah satunya dengan berpolitik. Yang menarik bagi peneliti ialah bagaimana pola rekrutmen dan kaderisasi yang ada di Partai Gerindra, dan bagaimana cara yang dilakukan Partai Gerindra untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik. Berdasarkan latar belakang diatas menjadikan alasan di balik pemilihan Partai Gerindra sebagai Objek Penelitian. Perempuan Indonesia Raya sebagai Organisasi Sayap Partai yang didirikan oleh Partai Gerakan



Indonesia Raya sebagai wujud usaha dalam mengajak perempuan untuk bergabung dalam Partai Gerindra.

### **B.Rumusan Masalah**

- 1.Bagaimana Proses Rekrutmen dan Kaderisasi perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo?
- 2.Bagaimana Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo?

### **C.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Rekrutmen dan Kaderisasi perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo.

### **D.Manfaat Hasil Penelitian**

a).Bagi Fakultas

Tambahan koleksi ilmiah sebagai referensi dan penelitian lanjutan terkait dengan Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo.

b).Bagi Peneliti

Sebagai media latihan untuk menguji konsep-konsep teoritik yang telah dikuasai terhadap permasalahan factual di lapangan dan untuk menambah pengetahuan tentang politik,pengalaman dilapangan dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Starta 1 Progam Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammdiyah Ponorogo.

c).Bagi Masyarakat

Untuk bepartisipasi dalam proses Rekrutmen dan Kaderisasi dalam Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi yang terdapat dalam penelitian ini, maka penegasan istilah akan dipaparkan sebagai berikut:

a). Analisis

Analisis adalah Proses berpikir dengan tujuan menguraikan komponen menjadi satu sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu (komaruddin, 2001).

b). Proses

Proses meliputi berjalannya suatu peristiwa dari awal hingga akhir atau sedang berjalan perbuatan, pekerjaan dan tindakan (Zain, 1996). Dalam melakukan suatu pekerjaan diperlukan langkah yang tepat agar setiap kegiatan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien dan tujuannya dapat tercapai.

c). Rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menempati pekerjaan & jabatan dalam suatu perusahaan (Rivai, 2004).

Dalam Rekrutmen dan Kaderisasi Politik terdapat proses pemilihan, seleksi dan pengangkatan individu atau golongan dengan tugas melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. (Surbakti, 1992).

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, partai mencari anggota baru dan mengajak orang untuk berpartisipasi mengikuti proses politik (Budiarjo, 2000).

d). Kaderisasi

Kader yaitu orang yang bergabung di organisasi dan memiliki tugas untuk mewujudkan visi dan misi organisasinya. Sedangkan Kaderisasi ialah proses seleksi bagi kader. Fungsi dari kaderisasi ialah untuk mempersiapkan calon yang akan memperjuangkan estafet organisasinya (Budiarjo, 2000).

Kaderisasi juga dapat memastikan apakah orang yang sudah terpilih dalam proses rekrutmen kompeten dan memiliki loyalitas sementara karakteristik kaderisasi dilihat oleh tipe dari partai. e).Kader Perempuan

Kader perempuan adalah perempuan yang masuk dan aktif dalam kegiatan partai politik. Mereka adalah kumpulan orang yang di didik pada pendidikan kader yang ada di organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi partai politik untuk dapat mencapai tujuan partai politik tersebut (Rahma, 2013).

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat(2) berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Hal tersebut sebagai salah satu landasan yang kuat untuk tidak adanya diskriminasi terhadap gender dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.

d).Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2000) pengertian politik segala aktivitas dalam suatu politik atau negara dimana didalamnya merupakan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan. Politik juga sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Negara dan dalam politik terdapat proses dan mekanisme awal dalam tahapan untuk mencapai tujuan negara. Agar tujuan negara dapat tercapai maka terlebih dahulu perlu adanya kebijakan umum yang berisi pengaturan, pembagian dan alokasi dan dalam proses menjalankan kebijakannya dibutuhkan adanya power atau kekuasaan dan authority atau



kewenangan untuk melakukan kerjasama guna menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses tersebut.

Partai Politik adalah kumpulan orang yang terorganisasi dengan tujuan memiliki kekuasaan terhadap pemerintahan (Budiarjo, 2000). Partai politik memiliki tujuan yang ingin dicapai dan memiliki tujuan mempertahankan kekuasaan melalui persaingan pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Partai dibentuk sebagai kendaraan guna menyeleksi kader, pemimpin negara pada posisi dan jenjang tertentu. Calon Kader dalam partai politik menjalani kaderisasi yang terdapat pendidikan berjenjang dan berkelanjutan untuk memahami platform partai, awal mula partai, tujuan partai sehingga memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. (Assidiqi, 2006)

f). DPC Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra dibentuk pada 6 Februari 2008, dirakam oleh H. Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Michdi Pr. Dewan Pimpinan Cabang adalah anak cabang partai yang berada ditingkat Kabupaten/Kota.

g). Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo berada di wilayah barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> memiliki 21 Kecamatan dan 305 desa/kelurahan 974 Dusun/Lingkungan, 2.272 Rukun Warga dan 6.842 Rukun Tetangga.

## **F. Landasan Teori**

Di bagian ini penulis akan memaparkan hal yang dianggap relevan dengan topik dan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya

a). Politik

Menurut Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2000) politik meliputi aktivitas politik merupakan proses untuk menentukan tujuan dan proses mencapai tujuan. Terlepas tentang bagaimana definisi politik tidak dapat dipungkiri bahwa politik tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Bahasan mengenai politik hingga saat ini masih menjadi bahasan yang menarik untuk dibahas hal ini membuktikan bagaimana politik masih erat kaitannya dengan manusia. Politik juga sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan Negara dan dalam politik terdapat proses dan mekanisme awal dalam tahapan untuk mencapai tujuan negara. Agar tujuan negara dapat tercapai maka terlebih dahulu perlu adanya kebijakan umum yang berisi pengaturan, pembagian dan alokasi dan dalam proses menjalankan kebijakannya dibutuhkan adanya power atau kekuasaan dan authority atau kewenangan untuk melakukan kerjasama guna menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses tersebut.

Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran politik hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik dan merubah pola pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang politik ini akan berdampak pada kurangnya pemahaman mereka terhadap hak dan kewajibannya dalam bernegara dan hanya fokus pada kehidupan dan kepentingan masing-masing tanpa peduli dengan hak dan kewajiban sesama warga negara.

Keikutsertaan dalam politik sangat mempengaruhi keputusan dan peraturan yang berlaku di masyarakat seperti halnya hak kita untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum lalu pemimpin yang kita pilih terpilih sebagai pemimpin misalnya maka pilihan kita tersebut memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan kebijakan sehingga kita sebagai rakyat yang di pimpinnya harus mengikuti peraturan yang di buat. Pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik terletak pada bagaimana pilihan kita dapat membawa perubahan yang baik terhadap lingkungan sekitar kita atau malah sebaliknya dalam hal ini kemampuan

analisis politik dan pemahaman politik sangat dibutuhkan,terpilihnya pemimpin tersebut tidak lepas dari keterlibatan kita dalam politik.

#### b).Partai Politik

Partai Politik adalah kumpulan orang yang terorganisasi dengan tujuanmemiliki kekuasaan terhadap pemerintahan (Budiarjo, 2000).Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsi fungsi partai politik adalah sebagai berikut.

- Komunikator Politik

Komunikator Politik sebagai penentu efektivitas komunikasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain secara tetap dan berkesinambungan.

- Negosiator Politik

Negoisator dalam politik berperan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak tertentu dan kesepakatan tersebut telah di setuju oleh kedua belah pihak.

- Lobby Politik

Lobi secara sederhana diartikan sebagai pihak yang bertugas mempengaruhi orang lain untuk mencapai keuntungan pada organisasi dan pemberi lobi.

#### c) Kebijakan Rekrutmen

Berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD didalamnya juga mengatur tentang mekanisme rekrutmen politik para calon legislative. Dalam peraturan tersebut juga mengatur tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu agar pemilihan legislative bisa berjalan jujur dan adil.

Terdapat tiga indikator dalam melakukan rekrutmen:

- Menganalisa Nilai dan pengaruh politik pada masyarakat
- Pola dari rekrutmen yang digunakan partai Politik
- Pola Rekrutmen yang dapat memberikan perubahan

Dalam proses rekrutmen terdapat tiga jenis. Pertama, sistem patronik (*patronage system*) sistem patronik atau sistem kawan, karena dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. Kedua, sistem merit (*merit system*) yang menilai kecakapan seseorang untuk menjabat dalam jabatan tertentu merit sistem bersifat objektif karena kecakapan menjadi yang dipertimbangkan. Ketiga sistem karir (*career system*) Sistem digunakan untuk menunjukkan suatu kemajuan (Tangkilisan, 2003)

Dalam rekrutmen terdapat dua prosedur terbagi dalam dua bagian yaitu :

1. Prosedur Tertutup, dilakukan orang yang memiliki kekuasaan sehingga dapat memilih orang yang akan diberikan jabatan.
2. Prosedur terbuka dimana memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih siapa calon pemimpin dan hasil dari pemilihan tersebut diumumkan secara terbuka. (Almond, 1996)

**Tabel 1.1 Pola Rekrutmen Partai Politik.**

Partisanship	Lebih fokus pada orang yang memiliki loyalitas yang tinggi
Survival	Memilih orang yang memiliki sumber financial dan massa, biasa dilakukan pada saat pemilu.
Meritokratik	Mencari orang yang memiliki kemampuan
Kompartementalisme	Berfokus mencari orang dalam tujuan penguatan organisasi

(Sumber: Wawancara)

Setelah menentukan pola rekrutmen Politik maka langkah selanjutnya seperti yang di bahas dalam workshop Workshop Rekrutmen dan Pelatihan Anggota Partai Politik tanggal 06 Oktober 2005 sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Rekrutmen

b. Menentukan kelompok yang akan direkrut (generasi muda, perempuan, pekerjaan, pengalaman organisasi, penghasilan, tingkat pendidikan)

c. Sarana dan Prasarana rekrutmen

d. Menentukan syarat dan kriteria perekrutan

e. Menentukan waktu dan lokasi perekrutan

Kriteria perekrutan kader Partai Gerindra terdiri dari :

1. Mental dan Ideologi
2. Penghayatan Visi dan Misi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta manifesto perjuangan partai
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela
4. Kepemimpinan
5. Militansi dan mandiri

d). Kebijakan Kaderisasi

Kualifikasi Kader yang diharapkan dapat menjalankan tugas kepemimpinan di masa mendatang sebagai berikut (Alfian, 1980):

a. Mempunyai kualitas kepemimpinan yang andal

b. Organisasi sebagai tempat mengabdikan dan pengabdian sebagai dasar dalam bekerja



c.Orientasi kepada pengabdian lebih tinggi daripada orientasi pada kekuasaan

d.Seseorang yang berprestasi

e.Memiliki rasa peka terhadap lingkungan sekitar

**Tabel 1.2 Jenjang Pengkaderan Partai Gerakan Indonesia Raya**

Kader Pratama	Anggota sudah mengikuti proses kaderisasi di tingkat Pimpinan Anak Cabang
Kader Muda	Anggota berusia 17 sampai dibawah 35 tahun dan dikaderisasi oleh DPC
Kader Madya	Anggota yang sudah dikaderisasi oleh DPP
Kader Menggala	Kader yang rampung kaderisasi Partai Gerindra hingga tingkat Nasional

(Sumber: Wawancara)

Sementara bentuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam proses kaderisasi tersebut antara lain :

1. Olahraga, ke Agamaan (ke Rohanian)
2. Kegiatan Pelatihan Baris Berbaris (PBB)
3. Kedisiplinan
4. Manifesto Perjuangan Partai Gerindra
5. Cinta NKRI dengan menanamkan jiwa korsa dan cinta tanah air kepada seluruh kader yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) serta menanamkan rasa cinta mereka kepada Partai Gerindra

Kaderisasi dan rekrutmen bagian dari fungsi partai politik yang kemungkinan akan mendapatkan kritik masyarakat yang kaitannya dengan kinerja kader sehingga mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Penerapan kuota keterwakilan perempuan ditujukan supaya tercipta perubahan budaya dalam partai politik untuk terciptanya sadar gender, mendorong, memfasilitasi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi aktivis partai hingga anggota legislatif. Partai politik harus menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk kader perempuan untuk mempersiapkan kader wanita yang memiliki potensi untuk maju hingga tahap pemilu. (Buckley F. Galligan Y, 2016)

b). Keterlibatan perempuan dalam pemilu

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dengan disahkannya UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar “partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. “Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Pemilu memberikan syarat adanya sistem zipper,yakni setidaknya ada satu perempuan di antara tiga calon yang di mulai pendaftaran bacaleg sesuai dengan Dapil di masing-masing tingkatan yang dilakukan oleh partai politik,saat di daftarkan bacaleg hanya boleh di ajukan oleh satu partai politik di satu Dapil.

#### **G.Definisi Operasional**

##### a).Indikator Rekrutmen Calon Anggota Partai Gerindra

- Memiliki Loyalitas yang tinggi dalam Partai
- Memiliki Sumber Financial
- Memiliki Massa
- Memiliki Keahlian,kapasitas dan kompetensi

##### b).Indikator Kaderisasi Anggota Partai Gerindra

- Anggota yang belum pernah mengikuti pengkaderan
- Anggota Berusia diatas 17-35 tahun
- Anggota yang sudah mengikuti pengkaderan tingkat PAC,DPC tingkat DPW hingga tingkat DPP.

#### **H.Metodologi Penelitian**

##### a).Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitiandeskriptif kualitatif,perolehan data di dapat dari hasil pengamatan secara langsung ke

beberapa informan kemudian di wawancarai lalu hasil wawancara dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut.

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen)dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),analisis data bersifat induktif/kualitatif,dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2019)

#### **b).Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Partai Gerakan Indonesia Raya DPC Kabupaten Ponorogo terletak di Jl. Yos Sudarso No.22 Kradengan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 63414.Partai Gerindra memiliki Organisasi Sayap Perempuan Indonesia Raya atau PIRA sebagai wadah bagi kader perempuan Partai Gerindra sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian yang sesuai dengan judul penelitian.

#### **c).Penentuan Informan**

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Prosedur *Purposive* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan yang relevan dengan pokok masalah dari penelitian. (Bungin, 2014)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penentuan informan menggunakan prosedur *purposive sampling* dengan mempertimbangkan orang-orang yang menjadi informan,prosedur ini lebih tepat dengan jenis penelitian kualitatif ini dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini informan yang di butuhkan ialah:

- a.Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ponorogo
- b.Ketua Perempuan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo

c.Kader Perempuan Partai Gerakan Indonesia Raya

d.Kader Laki-laki Partai Gerakan Indonesia Raya

e.Panitia Perekrutan

#### **d).Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian kualitatif berupa kata-kata serta tindakan lalu ada tambahan data seperti dokumen pendukung maupun arsip.

##### 1.Data Primer

Data ini di peroleh secara langsung di lapangan dan melalui pengamatan secara langsung saat berada di lapangan berupa wawancara.

##### 2).Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan digunakan untuk mendukung data primer melalui bahan pustaka meliputi skripsi,tesis,jurnal,UU ,artikel maupun arsip dokumen.

#### **e).Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menjadi awalalan dalam penelitian untuk memperoleh data.Berikut teknik yang digunakan untuk pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiyono, 2019)



## b. Observasi

Observasi ialah proses penelitian dengan melihat langsung kondisi di lapangan dengan melihat situasi dan kondisi (Sugiyono, 2019)

## c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku, literatur, catatan, jurnal dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. (Moh. Nazir, Metode penelitian, 2013).

## f). Teknik Analisis Data

Teknik analisis data meliputi proses mencari dan menyusun data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi secara sistematis kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Miles and Huberman (Huberman, 1994) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D menyebutkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019).

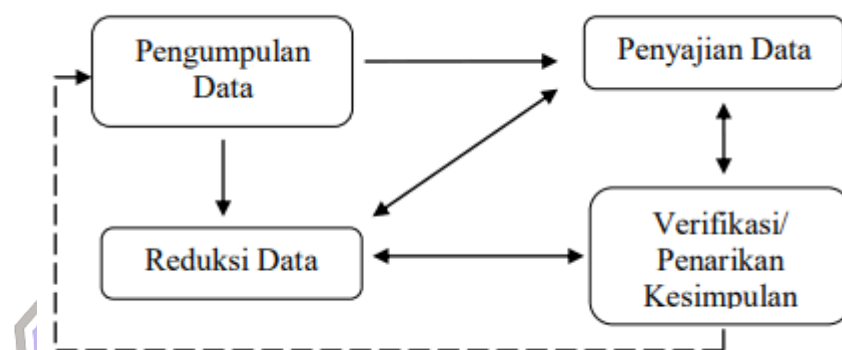
1. Pengumpulan Data, merupakan proses dalam melakukan penggalian sumber informasi dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data, dapat dilakukan dengan cara diskusi dengan orang lain yang dianggap ahli.

3. Penyajian data, berupa uraian singkat, baga, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan, agar peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal.

**Gambar 1.1 Skema Proses Analisis Data**



*Sumber: (Sugiyono, 2019)*

